

ARTI PENTING VERIFIKASI DAN DIAGNOSIS MASALAH DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN

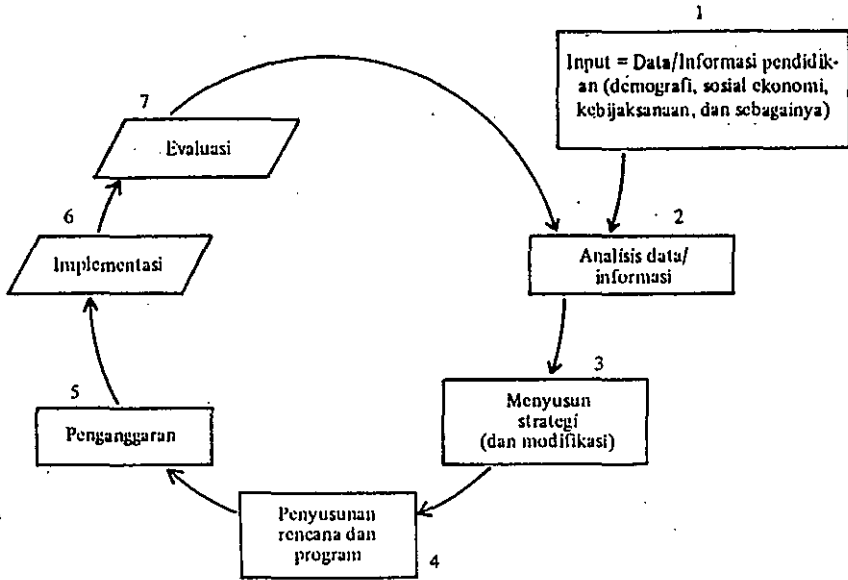
Oleh :
Tatang M. Amirin

Abstrak

Identifikasi dan analisis masalah merupakan tahapan paling awal dari seluruh rangkaian proses perencanaan. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting, tetapi kerap kali tidak mampu dilakukan dengan baik yang disebabkan oleh dua faktor pokok, yakni data dan informasi yang diperlukan tidak tersedia sesuai dengan keperluan, dan ketidakmampuan perencanaan melakukan identifikasi dan analisis masalah dengan baik. Mengidentifikasi masalah berarti mengenali dan mencatat segala sesuatu yang dipandang merupakan masalah, sedangkan menganalisis masalah berarti melakukan verifikasi, yakni menguji apakah yang dianggap sebagai masalah itu benar-benar merupakan masalah yang sebenarnya dan mendesak untuk dipecahkan, dan melakukan diagnosis, yakni mengenali faktor-faktor penyebab timbulnya masalah. Dapat terjadi perencana langsung menentukan berbagai alternatif pemecahan masalah tanpa melakukan verifikasi dan diagnosis yang cermat terhadap masalahnya itu sendiri. Lalu, apa sebenarnya yang bisa dinamakan sebagai masalah dalam pendidikan itu, bagaimana menemukannya, mengujinya, dan mendiagnosisnya? Dan kenapa pula verifikasi dan diagnosis masalah itu sedemikian penting artinya dalam perencanaan pendidikan?

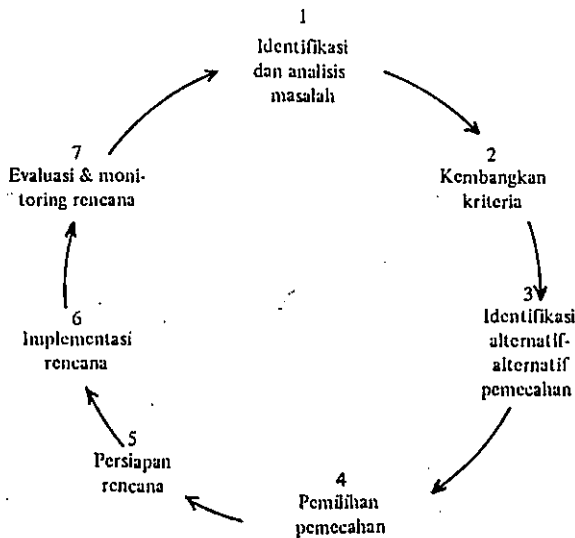
1. PENDAHULUAN

Perencanaan pendidikan secara singkat dapat dirumuskan sebagai proses pemilihan alternatif pemecahan masalah-masalah pendidikan yang terbaik. Sebagai suatu proses, perencanaan itu merupakan serangkaian kegiatan yang pada akhirnya akan merupakan suatu daur kegiatan. Rumusan mengenai tahap-tahap kegiatan perencanaan itu sendiri ada bermacam-macam. Simanungkalit dkk. (1987: 12) merumuskan dan melukiskan tahap-tahap kegiatan perencanaan tersebut seperti tampak dalam gambar 1 berikut :



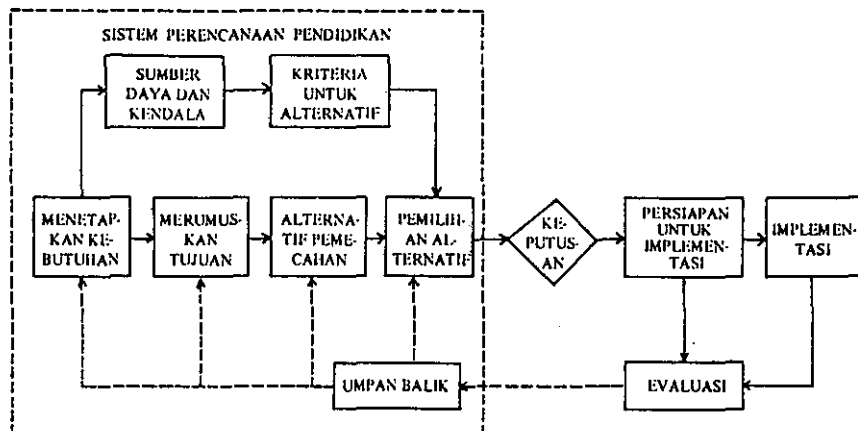
Gambar 1. SISTEM PERENCANAAN PENDIDIKAN MODEL SIMANUNGKALIT DKK.

Doran Bernard dkk. (1987: 3) merumuskan dan melukiskannya seperti tampak dalam gambar 2 berikut :



Gambar 2. SISTEM PERENCANAAN PENDIDIKAN MODEL BERNARD DKK.

Sementara BPP (BP3K sekarang) yang dikutip oleh penyusun buku Materi Dasar Kependidikan Program Akta Mengajar V, Buku IIB: Perencanaan Pendidikan (1982: 23) merumuskan dan melukiskannya sebagai berikut:



Gb. 3. Sistem Perencanaan Pendidikan Model BPP.

Seperti tampak dalam ketiga gambar di atas, model I dan II memasukkan pelaksanaan rencana dan penilaiannya (evaluasi dan monitoring) sebagai unsur atau tahapan perencanaan, sementara pada model III, kendati dimasukkan, dibatasi oleh garis putus-putus yang kemungkinan dimaksudkan oleh perumus sebagai batas yang menunjukkan bagian yang termasuk proses perencanaan dan yang di luar proses tersebut, yakni yang sudah masuk pada tahap pelaksanaan rencana. Namun demikian, model I dan II tampaknya memasukkan unsur pelaksanaan dan evaluasi rencana sekedar untuk memenuhi keinginan menunjukkan bahwa proses perencanaan itu pada akhirnya akan merupakan proses yang berulang, merupakan daur, yang tidak pernah akan berhenti dilakukan.

Dengan memperbandingkan rumusan-rumusan di muka, proses perencanaan pendidikan itu dapat dirumuskan meliputi:

1. Identifikasi dan analisis masalah
2. Identifikasi kebijakan
3. Identifikasi sumber daya dan kendala
4. Penetapan tujuan atau target

5. Penetapan kriteria pemilihan alternatif pemecahan masalah atau pencapaian tujuan/target
6. Identifikasi alternatif-alternatif pemecahan masalah atau pencapaian tujuan/target
7. Penyaringan/pemilihan alternatif terbaik
8. Formulasi rencana
9. Penjabaran rencana.

Para perencana pendidikan dalam jajaran Departemen Pendidikan, dan mungkin juga dalam jajaran Departemen lain, pada hakekatnya merupakan sehimpunan orang yang bertugas menyiapkan sejumlah pilihan kebijakan mengenai masa depan pendidikan yang nantinya akan ditetapkan oleh pembuat keputusan di bidang ini. Para perencana pendidikan sendiri bukanlah pembuat keputusan. Perencana pendidikan, setelah menganalisis keadaan sistem pendidikan dan mengaitkannya dengan tujuan pendidikan serta berpedoman pada kebijakan yang ada, merumuskan masalah-masalah pendidikan dan menyusun alternatif pemecahannya. Alternatif pemecahan masalah ini kemudian diajukan kepada pengambil keputusan, dan terserah pengambil keputusan akan memilih salah satu atau tidak memilih satu pun dari alternatif-alternatif yang diusulkan tersebut (Simanungkalit: 1987: 29-30).

2. APA YANG DIMAKSUD MASALAH

Istilah "masalah" amat sering dipergunakan dalam berbagai pengertian. Contoh-contoh penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. "Ada tiga *masalah* yang akan kita bahas dalam kajian kita kali ini, yakni mengenai definisi perencanaan pendidikan, prinsip-prinsip perencanaan pendidikan, dan proses perencanaan pendidikan."
2. "*Masalahnya* memang saya tidak tahu, jadi tidak bisa memberikan keterangan apa-apa mengenai kenapa ia tidak bisa ikut latihan, bukan saya pura-pura tidak tahu."
3. "Yah, mahlum, ia sedang ada sedikit *masalah* dengan suaminya!"
4. "I.P.-mu *kok* makin lama makin rendah saja! Kau punya *masalah* apa sih?"
5. "Rencana kerja yang diusulkan itu memang baik-baik semua, cuma, *masalahnya*, kita tidak punya cukup dana untuk melakukan semua itu!"
6. "*Persoalan* ini sebaiknya tidak kita *permasalahkan* lebih jauh, kita sebaiknya mulai saja membicarakan *masalah* lain!"

Demikianlah tampak bahwa istilah "masalah" itu dipergunakan untuk menunjukkan keadaan atau sesuatu yang beragam; ada yang menunjuk pokok bahasan atau kajian, ada yang menunjuk pada kesulitan atau kendala, ada yang menunjuk faktor penyebab ketidakberhasilan melakukan se-

suatu, ada pula yang menunjuk pada "konflik". Dan mungkin masih ada penggunaan dalam pengertian lain.

Bernard dkk. (1987:4) mencoba merumuskan masalah itu sebagai "kesenjangan antara apa yang sebenarnya terjadi dengan sesuatu yang seharusnya terjadi sekarang". Dalam kalimat lain dapat pula dirumuskan sebagai "kesenjangan antara tujuan yang hendak atau seharusnya tercapai dengan keadaan yang sudah tercapai."

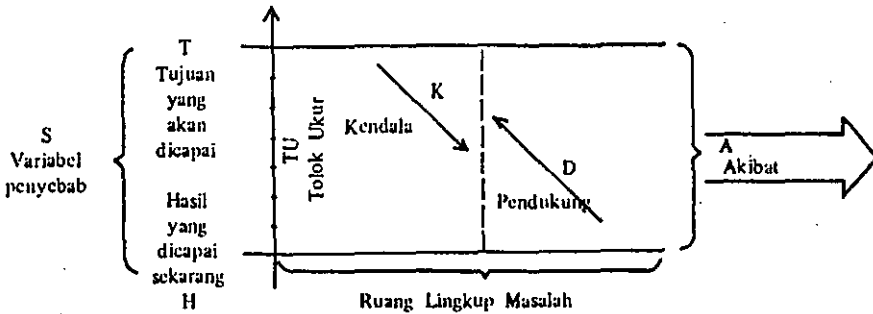
Sebagai contoh, idealnya semua anak usia sekolah, dalam hal ini digunakan usia wajib belajar (7 - 12 tahun), seluruhnya atau 100% bersekolah. Jika dalam kenyataan baru terdapat sebesar 75% saja yang bersekolah, maka terdapat masalah, yakni kesenjangan sebesar 25% antara yang ditargetkan dengan yang sudah tercapai atau dengan keadaan sekarang.

Contoh lain lagi, diharapkan atau ditargetkan lulusan pendidikan dasar (SD dan yang sederajat) tertampung atau dapat melanjutkan studinya ke tingkat menengah sebesar 85%. Apabila hanya 40% saja dari lulusan pendidikan dasar itu yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat menengah, berarti ada masalah, yakni ada kesenjangan sebesar 45% dari yang ditargetkan.

Penganggur-penganggur intelektual tidak menjadi masalah walaupun jumlahnya amat banyak jika memang tidak ada ketentuan bahwa idealnya mereka tidak menganggur. Karena bagi pemerintah dan negara penduduk usia produktif itu, semisal lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi, idealnya semua bekerja produktif bagi pembangunan nasional, pengangguran intelektual yang sedemikian banyak itu jelas merupakan masalah. Tetapi bagi perguruan tinggi penghasil lulusan-lulusan yang dikategorikan sebagai kaum intelektual itu hal itu bukan merupakan masalah *apabila* perguruan tinggi tersebut sekedar berprinsip harus tetap berdiri, menerima calon mahasiswa sebanyak-banyaknya, dan meluluskan sebanyak-banyaknya, sukur-sukur dengan nilai baik, sehingga masyarakat makin tertarik memasuki perguruan tinggi tersebut.

Masalah tidak sama dengan faktor penyebab timbulnya masalah. Jika baru 40% lulusan pendidikan dasar bersekolah di sekolah lanjutan karena daya tampung SMTP memang terbatas, maka daya tampung SMTP itu merupakan penyebab, bukan masalah. Baru dikatakan sebagai masalah jika sudut penglihatannya dari kaca mata bahwa SMTP seharusnya mampu menampung 85% lulusan pendidikan dasar. Sudah barang tentu dalam pemecahan masalah, betapapun, faktor penyebab ini harus diperhitungkan pula. Bahkan, akibat dari munculnya masalah itu pun harus pula diperhatikan dalam mencari alternatif pemecahan masalah.

Sudomo (1987) mencoba melukiskan "sistem masalah" tersebut sebagai tampak dalam gambar berikut :



Gambar 4. BAGAN "SISTEM MASALAH"

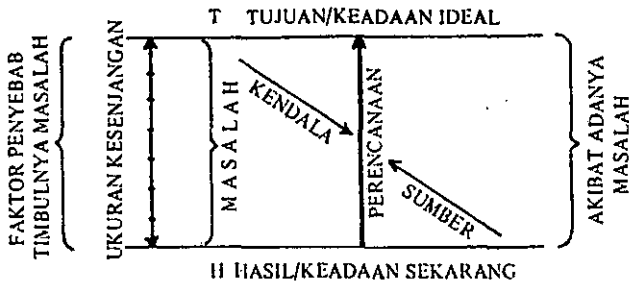
Jika garis T (tujuan yang hendak dicapai) berhimpitan dengan garis H (hasil yang telah tercapai atau keadaan sekarang), maka berarti tidak ada masalah, karena tidak ada kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian pada hakekatnya perencanaan itu merupakan usaha untuk menghimpitkan garis H dengan garis T. Seberapa besar kesenjangan yang terdapat antara T dengan H diukur dengan mempergunakan tolok ukur tertentu (TU). Kesenjangan antara tujuan menjadikan semua anak usia sekolah bersekolah dengan yang senyatanya bersekolah, misalnya, diukur dengan menghitung selisihnya dan menyatakannya dalam persentase.

Kendala (K) — menurut konsep Sudomo — selalu membuat upaya pencapaian tujuan terintangi, sementara faktor pendukung (D) sebaliknya. Masalah muncul disebabkan oleh berbagai faktor penyebab (S), dan dapat membawa akibat-akibat (A) tertentu.

Jika dikaji, antara kendala dengan faktor penyebab tampak bertumpang tindih. Kendala dan pendukung tampaknya akan lebih cocok ditiadakan dari "sistem masalah", sebab kendala sudah tercakup dalam faktor penyebab timbulnya masalah, sementara faktor pendukung tidak cocok disebut-sebut dalam sistem tersebut sebab bisa rancu dengan faktor penyebab yang dapat dikatakan sebagai "faktor pendukung timbulnya masalah".

Tanda panah putus-putus tidak pula cocok sebagai bagian dari sistem masalah, tanda panah itu akan lebih cocok untuk melukiskan perencanaan itu sendiri yang, seperti telah disebutkan di muka, merupakan upaya menghimpitkan garis H dengan garis T.

Dengan demikian, dengan perubahan seperlunya, maka gambar atau model sistem tersebut akan lebih cocok jika disebut sebagai model "masalah dan perencanaan". Modelnya dengan demikian akan seperti tampak dalam gambar berikut :



Gambar 5. BAGAN MASALAH DAN PERENCANAAN

3. IDENTIFIKASI MASALAH

Jika sudah disepakati apa yang dimaksudkan dengan masalah dalam kaitannya dengan perencanaan pendidikan, maka hal lain yang perlu dibahas adalah bagaimana dan dari mana mengidentifikasi masalah. Sudah barang tentu karena berkaitan dengan perencanaan pendidikan, maka sumber masalah adalah sistem pendidikan itu sendiri, dalam hal ini sistem pendidikan sebagai sehimpunan komponen pendidikan yang berkaitan secara fungsional untuk mencapai tujuan pendidikan dalam lingkungan tertentu.

Karena masalah telah didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang diharapkan atau dituju dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, terdapat, atau telah dicapai, maka sudah barang tentu tolok ukur untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah adalah tujuan atau sasaran yang diharapkan tercapai tersebut.

Jika yang ditargetkan adalah tercapainya angka partisipasi, yakni bersekolahnya anak-anak usia sekolah, sebesar 100%, maka target 100% ini menjadi tolok ukur. Jika ditargetkan angka transisi, yakni bersekolahnya lulusan pendidikan dasar di sekolah menengah, sebesar 85%, maka target 85% ini merupakan tolok ukur.

Sudah barang tentu masih terdapat berbagai "kebijakan" lain yang telah ditetapkan, baik dalam GBHN, Repelita, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, dan lain-lain yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur. Secara umum tolok ukur dalam bidang pendidikan itu adalah relevansi, efektivitas, dan efisiensi; dalam hal ini efisiensi dan efektivitas kerap disebut pula sebagai produktivitas.

Dengan membandingkan keadaan sekarang atau yang sudah dicapai dengan tolok ukurnya itu maka akan dijumpai sekian banyak masalah dalam sistem pendidikan. Proses inilah yang disebut dengan identifikasi atau pendaftaran masalah. Tinggi rendahnya kesenjangan antara keadaan

sekarang dengan tolok ukurnya akan menjadi penentu besar kecilnya masalah.

Faktor penyebab kesulitan yang seringkali timbul untuk mengidentifikasi masalah maupun menguji atau memverifikasi dan mendiagnosis masalah ada dua yang paling pokok. Pertama, data dan informasi yang mudah diperoleh dengan cepat, tepat waktu, lengkap, cermat, tepat dan sesuai dengan kebutuhan tidak selalu ada di lapangan. Kedua, kekurangan tenaga yang benar-benar trampil untuk mengumpulkan data dan informasi, mengolahnnya, dan menganalisisnya dengan baik; dengan kata lain perencanaan tidak mampu mengidentifikasi, memverifikasi dan mendiagnosis masalah dengan baik.

Data dan informasi yang memenuhi syarat tidak selalu tersedia sesuai harapan dapat disebabkan berbagai faktor, yaitu :

1. Hambatan komunikasi yang disebabkan transportasi tidak lancar.
2. Data kependidikan tidak semuanya berada di satu tangan. Depdikbud Kecamatan, misalnya, tidak selalu memiliki data kependidikan yang menyangkut madrasah ibtidaiyah dan sejenisnya yang secara organisatoris berada di "jalur" lain. Depdikbud Kabupaten tidak selalu memiliki data SMTA karena lalu lintasnya tidak sepenuhnya melaluinya, melainkan langsung ke Bidang Pendidikan Menengah Kanwil. Kanwil Depdikbud sendiri, kendati kerap ditanya orang yang salah tafsir mengenai wewenangnya tidak sepenuhnya bisa memiliki data perguruan tinggi karena "jalurnya" juga lain.
3. Data dan informasi yang terdapat di lapangan, dalam jajaran Depdikbud jenjang terbawah, lebih banyak berupa data kuantitatif, amat sedikit, jika tidak mau dikatakan tidak memiliki, data kualitatif. Yang bisa diketahui, misalnya, hanyalah angka banyaknya murid yang putus sekolah, tetapi tidak bisa dengan segera diketahui siapa saja dan kenapa menjadi putus sekolah.
4. Berbagai "kebijakan" dari atas kerap kali tidak sampai ke bawah tepat waktu. Dapat pula terjadi kebijakan dimaksud sampai utuh seperti apa adanya tanpa penjelasan operasional apa pun sehingga tidak mudah dipahami secara seragam oleh bawahan.

4. VERIFIKASI MASALAH

Memverifikasi masalah berarti menguji atau mengecek dengan cermat apakah yang dianggap sebagai masalah pada saat dilakukan identifikasi itu memang merupakan masalah yang sebenarnya, masalah yang "potensial". Verifikasi masalah ini amat perlu dilakukan sebab, karena data dan informasi yang dimiliki kerap kali tidak lengkap, perencanaan dapat tidak cermat

atau terkecoh oleh data yang dimiliki. Harus diakui bahwa bergelut dengan angka-angka itu kerap kali melelahkan juga.

Misalkan saja dari data statistik yang ada diketahui di sesuatu Kecamatan terdapat jumlah SD sekian buah, ruang kelasnya ada sekian buah, dan jumlah murid ada sekian orang. Diketahui pula jumlah SMP ada sekian buah, jumlah ruang kelasnya ada sekian buah, dan jumlah muridnya ada sekian orang. Data lain tidak diketahui.

Dicoba melakukan identifikasi ada masalah ataukah tidak. Secara selintas diketahui jumlah murid SD berbanding SMP ternyata sangat mencolok. Setelah dihitung-hitung, dengan mempergunakan berbagai "asumsi" karena data terinci tidak ada, tercatat ada sekian banyak lulusan SD pada tahun tertentu. Setelah dihitung-hitung dengan cara yang sama, ada sekian banyak murid baru tingkat I SMP pada tahun tersebut. Setelah diperbandingkan, diketahui hanya ada sekitar 37% saja lulusan SD yang melanjutkan studi ke SMP. Mengingat "kebijakan" atau target lulusan pendidikan dasar itu 85% melanjutkan studi ke sekolah menengah, dengan memperhatikan data tersebut diketahui ada kesenjangan sebesar 48%. Ini *masalah* besar. Lalu disimpulkanlah bahwa yang menjadi *masalah* adalah daya tampung SMP.¹⁾

Pengambilan kesimpulan serupa itu sudah barang tentu tidak tepat. Pertama, data murid dan lulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak termasuk dalam data tersebut, padahal untuk mengkaji angka transisi atau persentase lulusan pendidikan dasar yang melanjutkan ke sekolah menengah pertama harus melibatkan pula lulusan MI.

Kedua, jumlah murid baru SMTP pun hanya mengenai SMP saja, tidak mencakup SMTP lainnya, yakni madrasah tsanawiyah (dalam hal ini ST, SKKP dan sebagainya dalam lingkungan Depdikbud memang tidak terdapat di Kecamatan dimaksud). Bukan tidak mustahil sebagian lulusan SD itu masuk ke madrasah tsanawiyah.

Ketiga, menyimpulkan bahwa masalahnya adalah daya tampung SMTP yang tidak memadai jelas lari dari konteksnya ke faktor penyebab, bukan masalahnya itu sendiri.

Keempat, menyimpulkan faktor penyebab timbulnya masalah sebagai rendahnya daya tampung SMTP pun masih memerlukan pengujian, sebab bisa terdapat banyak faktor penyebab, yang justru mungkin merupakan faktor penyebab utama. Misalnya karena lulusan SD itu sendiri (dan orang tuanya) tidak berkehendak melanjutkan sekolah, tingkatan sosial ekonomi rendah dan sebagainya. Bahkan bisa terjadi lulusan SD dari Kecamatan ter-

1) Contoh keadaan data dan pemrosesannya sehingga memunculkan kesimpulan serupa itu dijumpai dalam praktek Latihan Ketrampilan Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan di Surabaya, 7 - 12 Juni 1987.

sebut melanjutkan sekolahnya ke luar Kecamatan; dan tentang ini tidak mempunyai data yang lengkap serta tepat.

Dengan demikian tampak benar bahwa verifikasi masalah sangat penting dilakukan mengingat data dan informasi yang dimiliki kerap kali amat terbatas itu.

Diagnosis Masalah

Diagnosis masalah dimaksudkan sebagai kegiatan mengkaji, menelaah secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah. Dalam kasus seperti telah disebutkan di muka tampak bahwa faktor penyebab timbulnya masalah itu tidak atau belum tentu hanya satu hal saja, yakni daya tampung SMTP yang rendah, sebab masih ada kemungkinan lain, yakni karena tidak mau melanjutkan sekolah atau tidak mampu melanjutkan sekolah, karena memandang SMP yang ada di Kecamatannya tidak sesuai dengan selera sehingga bersekolah di luar Kecamatan, atau sebab-sebab lain.

Diagnosis masalah sebenarnya tidak cukup hanya sampai melihat faktor penyebab saja. Bagi pemecahan masalah yang akurat seyogyanya diteliti pula berbagai faktor yang berkaitan dengan masalah tersebut, termasuk akibat yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Akibat dari masalah itu tentu memerlukan pemecahan pula di samping memecahkan masalah dan faktor penyebabnya yang mungkin akan berulang pada tahun-tahun mendatang.

Jika, misalnya, tidak melanjutkan sekolah itu kemudian menyebabkan lulusan pendidikan dasar itu menjadi "pekerja" bersama-sama orang tuanya di sektor pertanian, tentu mereka memerlukan "pendidikan/latihan" yang sesuai dengan pekerjaannya tersebut, sebab dari pendidikan dasarnya tidak cukup banyak bekal yang diperoleh untuk "bekerja" serupa itu secara "ilmiah". Lebih-lebih jika keadaan serupa itu telah berlangsung beberapa tahun lamanya yang berarti sudah sekian banyak lulusan SD yang masuk usia kerja tanpa bekal memadai.

Jika, misal lain, karena tidak melanjutkan sekolah itu kemudian menjadikan lulusan pendidikan dasar tersebut "luntang-lantung" tidak menentu, tentu juga memerlukan penanganan tersendiri agar tidak menimbulkan hal-hal yang negatif.

Walaupun dalam kerangka uraian mengenai proses atau tahapan kegiatan perencanaan identifikasi sumber dan kendala merupakan tahap tersendiri, pada saat melakukan diagnosis masalah sudah barang tentu dapat pula sekaligus mengidentifikasi sumber dan kendala untuk pemecahan masalah dan penyebabnya itu. Dengan teridentifikasikannya kendala-kendala ini perencana dapat melakukanantisipasi yang tepat, baik berupa penurunan

target, misalnya dengan "memperpanjang" tahapan pencapaiannya, maupun sekaligus memecahkan masalah dengan menanggulangi kendala yang ada.

5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASINYA

Dari uraian dan contoh-contoh kasus di muka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan pendidikan, baik yang bersifat mikro di lembaga atau di daerah, meso di wilayah, dan makro di pusat, bukan merupakan proses yang mudah.
2. Tahap identifikasi, verifikasi, dan diagnosis masalah merupakan tahap yang amat penting karena merupakan titik tolak perencanaan. Tanpa melakukan tahap ini dengan sebaik-baiknya perencana dapat menentukan alternatif pemecahan masalah yang tidak tepat.
3. Untuk dapat melakukan identifikasi, verifikasi, dan diagnosis masalah secara baik diperlukan tersedianya data dan informasi yang jelas, tepat, lengkap, cermat, dan mudah diperoleh tepat pada waktu diperlukan yang berkaitan dengan :
 - a. kebijakan, tujuan, target
 - b. keadaan sekarang atau yang sudah dicapai
4. Untuk dapat melakukan identifikasi, verifikasi, dan diagnosis masalah secara tepat, perencana pendidikan dituntut memiliki pengetahuan dan ketrampilan memadai di bidang :
 - a. teknik/metodologi perencanaan pendidikan
 - b. metodologi penelitian
 - c. metodologi analisis data.

Selain itu perlu pula memiliki pengetahuan yang luas mengenai sistem pendidikan dan kaitannya dengan sistem lainnya, serta dituntut pula memiliki kreativitas yang tinggi, sifat tekun, cermat, sabar, dan berbagai sifat lain yang mendukung profesinya.

5. Dalam praktek data dan informasi yang diperlukan tidak selalu dengan mudah diperoleh disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena pengelolaan pendidikan tidak berada di satu tangan, mekanisme hubungan organisasi, dan sistem pendidikan kerap kali harus bersangkut paut dengan sistem lainnya yang berada dalam wewenang pengelolaan instansi bukan kependidikan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka beberapa hal dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Kerjasama antar instansi yang terkait dalam perencanaan pendidikan (Depdikbud, Depag, Dinas P & K, Bappeda, Pemda, dan lain-lain)

- yang selama ini sudah mulai dirintis dan diatur mekanismenya perlu dibina dan dikembangkan serta didayagunakan seoptimal mungkin.
2. Upaya peningkatan ketrampilan para perencana pendidikan dan kebudayaan di Daerah yang selama ini sudah dilakukan, antara lain dengan proyek STEPPES (Proyek Peningkatan Kemampuan Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan) perlu ditingkatkan dalam segi :
 - a. buku pegangan, dalam hal ini uraian dan bahasanya disempurnakan sehingga bisa menjadi modul yang betul-betul dapat memuntun atau memadu petugas
 - b. metodologi penyampaian, yakni lebih disesuaikan dengan "entry-behavior" peserta yang beragam, dan memperbanyak praktek secara sistematis
 - c. sistematika materi dan jadwal latihan.
 3. Keikutsertaan unsur perguruan tinggi, khususnya tenaga pengajar Jurusan Administrasi Pendidikan, dalam Latihan yang telah mulai dirintis untuk pertama kalinya pada Latihan di Surabaya 7 - 12 Juni 1987), terus dilanjutkan dan bisa pula dipikirkan untuk dikembangkan menjadi keikutsertaan kelembagaan dalam bentuk pemberian kesempatan tugas belajar untuk memperoleh Akta atau Diploma dan gelar keserjanaan dengan alih kredit bagi karyawan-karyawan Depdikbud yang memerlukannya, dan pelibatan dosen dan mahasiswa secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan perencanaan pendidikan.

BAHAN BACAAN

- Bernard, D., dkk., 1987, *Perencanaan Pendidikan di Daerah: Identifikasi dan Analisis Masalah*, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Depdikbud.
- Depdikbud, Ditjendikti, 1982, *Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V*, Buku IIB: *Perencanaan Pendidikan*.
- Gaffar Mohammad Fakry, 1987, *Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi*, PPLPTK Ditjendikti Depdikbud, Jakarta.
- Guruge, A.W.P., 1977, *Basic Training Programme in Educational Planning and Management*, Book V: *From Planning to Plan Implementation*, Unesco Regional Office for Education in Asia, Bangkok.
- Kline, David, 1980, *Planning Education for Development*, Volume III: *Research Methods for Educational Planning*, CSED Harvard University, Cambridge.
- Simanungkalit, T., dkk., 1987, *Sistem dan Mekanisme Perencanaan Tahunan Terpadu Rutin dan Pembangunan Depdikbud*, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Depdikbud.
- Sudomo, 1987, Ceramah dalam Latihan Ketrampilan Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, Surabaya, 7 - 12 Juni 1987.